

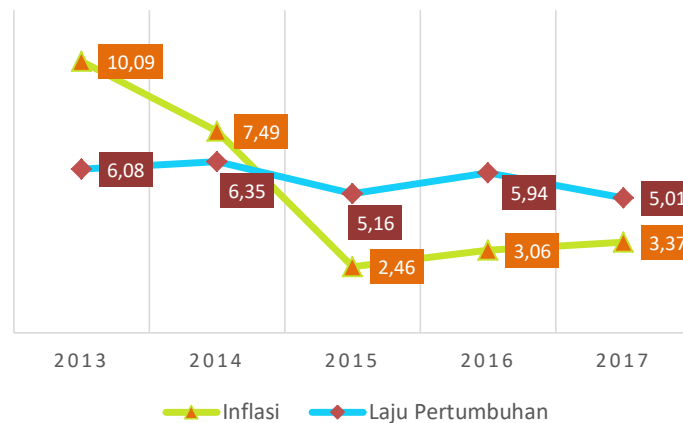


### 6.1 Inflasi dan Laju pertumbuhan ekonomi

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi dibawah 10 persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10 persen.

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.

Grafik 6.1.1. Inflasi Kota Tanjungpinang dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan, 2013-2017



Pada tahun 2014 terlihat bahwa inflasi yang menurun memicu percepatan ekonomi dari 6,08 menjadi 6,35 pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 terjadi penanjakan tajam harga untuk bahan makan maupun non makanan termasuk transportasi dan komunikasi. Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga Bahan Bakar Minyak yang mulai naik pada bulan Juni 2012. Kenaikan BBM berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Bintan. Disamping itu adanya Undang-Undang dalam pembatasan hasil tambang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertambangan merupakan *share* terbesar kedua dalam PDRB Kabupaten Bintan ketika pada tahun tersebut.

## 6.2 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variabel kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangkan karena akan sangat berpengaruh bagi program pengentasan kemiskinan di daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program

pengentasan kemiskinan perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai.

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kelompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar yang dihadapi Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Bintan. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat hubungan antara Kemiskinan dan *Gini Ratio*.

**Tabel 6.2.1. Persentase Penduduk Miskin dan *Gini Ratio*  
Kabupaten Bintan, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kemiskinan</b>	6,23	6,09	6,07	6,43	6,01
<b><i>Gini Ratio</i></b>	0,362	0,358	0,318	0,328	0,299

Dari Tabel 6.2.1 di atas dapat kita lihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan pada periode 2013-2015 mengalami penurunan dan fenomena yang terjadi pada *Gini Ratio* secara umum juga semakin menurun. Artinya, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Bintan mulai semakin merata. Kesenjangan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi semakin kecil. Pada periode 2015-2016, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2016, *Gini Ratio* pun juga mengalami peningkatan. Artinya, distribusi pendapatan antar penduduk kabupaten Bintan perlahan-lahan lebih merata. Pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dan penurunan Indeks *Gini Ratio*, yang artinya distribusi pendapatan antar penduduk berpenghasilan rendah dan penduduk berpenghasilan tinggi semakin merata.

### **6.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

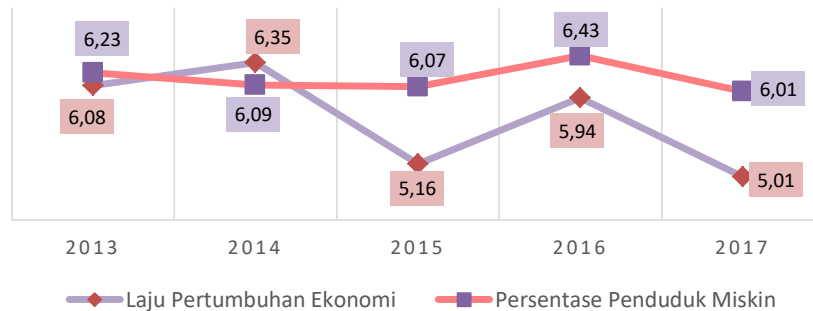
Masalah mendasar dalam proses pertumbuhan ekonomi bukan hanya bagaimana menumbuhkan perekonomian secara cepat namun juga terkait dengan siapa yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dihasilkan dari ekspansi ekonomi kelompok penduduk kaya, maka manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kelompok penduduk kaya. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berkualitas bila 90 persen manfaat

pertumbuhan ekonomi (dalam bentuk pendapatan nasional) hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk. Sisanya, 10 persen manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh 80 persen penduduk. Pertumbuhan ekonomi seharusnya melibatkan peran serta seluruh penduduk sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dan dapat terdistribusi dengan lebih merata. Namun, kenyataannya pertumbuhan ekonomi kurang memberikan manfaat kepada penduduk miskin dan lebih banyak dinikmati penduduk tidak miskin.

Salah satu pendapat mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan adalah pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi harus dilaksanakan secara simultan. Berbagai kebijakan pembangunan ekonomi seharusnya dirumuskan agar seluruh elemen penduduk dapat berperan serta dalam proses pertumbuhan ekonomi termasuk penduduk miskin. Peningkatan peran serta penduduk miskin dapat dilakukan dengan lebih memberdayakan penduduk miskin melalui perbaikan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan peningkatan akses terhadap sumber daya faktor produksi.

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

**Grafik 6.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan, 2013-2017**



Grafik di atas menggambarkan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan. Pada 2017, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, begitu pula dengan persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2017 ini bisa disebabkan karena berkurangnya produksi tambang bauksit Kabupaten Bintan, yang mungkin signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

#### 6.4 Perbandingan Regional PDRB

Perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator terpilih memperlihatkan variasi yang cukup besar. Dilihat berdasarkan perbedaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tanpa Migas, terlihat ketimpangan yang sangat tinggi. PDRB ADHB tertinggi tercatat di Kota Batam yang mencapai 137,46 triliun rupiah

pada tahun 2017. Angka ini hampir lima puluh tiga kali lipat dibandingkan angka terendah yang tercatat di Kepulauan Anambas yang hanya mencapai 2,63 triliun rupiah. Kabupaten Bintan menempati peringkat ke-2 terbesar penyumbang PDRB Kepulauan Riau, setelah Kota Batam selama periode 2016-2017.

**Tabel 6.4.1. Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau 2015-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
<b>PDRB ADHB Tanpa Migas (Juta Rp)</b>			
Karimun	9 632 110,9	10 610 202,3	11 620 590,2
Bintan	15 481 098,4	17 206 439,2	18 993 962,6
Natuna	4 431 220,1	4 904 441,4	5 403 634,6
Lingga	3 043 433,9	3 284 253,5	3 671 892,0
Kepulauan Anambas	2 181 441,6	2 408 943,1	2 636 709,9
Batam	120 945 741,0	130 553 208,1	137 467 712,2
Tanjungpinang	15 842 107,1	17 078 299,2	18 104 626,8

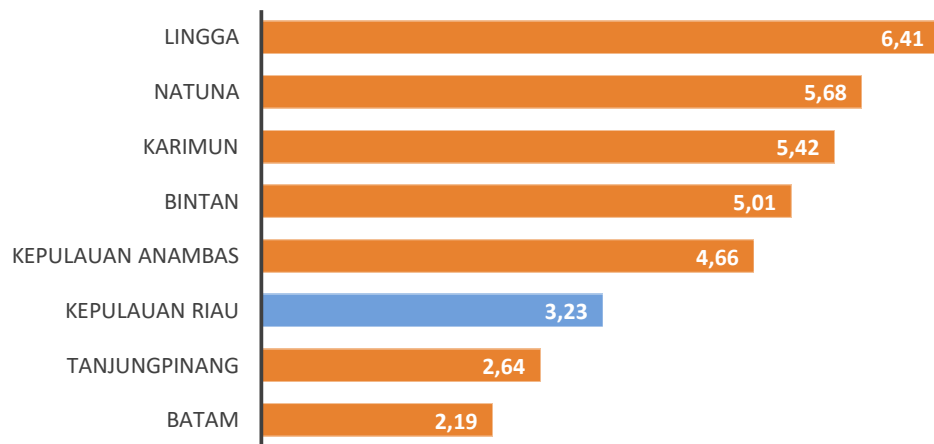
**\*Angka Sementara**

**\*\*Angka Sangat Sementara**

**Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau**

Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau semakin mengalami perlambatan selama periode 2013-2017. Pertumbuhan tertinggi sebesar 7,92 persen terjadi pada tahun 2013 dan mengalami perlambatan pada tahun 2017 menjadi 3,23 persen. Kota Batam memiliki pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,18 persen tetapi semakin mengalami perlambatan sehingga pada tahun 2017 PDRB Batam hanya tumbuh 2,19 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Bintan menempati peringkat ke-4 pada tahun 2017 setelah Lingga, Natuna dan Karimun.

**Grafik 6.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2017**



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau